

Komunikasi Massa Sebagai Bentuk Pengawasan Terhadap Kebijakan Politik

by Kartini Kartini

Submission date: 06-May-2024 08:57PM (UTC-0500)

Submission ID: 2372855036

File name: Komunikasi_dan_Sosia_-_VOLUME._2,_NO.2_JUNI_2024_hal_118-124.pdf (1.02M)

Word count: 2204

Character count: 14916



Komunikasi Massa Sebagai Bentuk Pengawasan Terhadap Kebijakan Politik

Kartini Kartini¹, Novia Elisa², Nurtia Asty Rahman³, Adiva Amanda⁴, Nada Hanifah Harahap⁵, Rahmi Hilda Yanti Lubis⁶

¹⁻⁶ Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : kartinisikumbang86@gmail.com¹, noviaelisa04@gmail.com²,
nurtiaarahman09@gmail.com³, adivaamanda24@gmail.com⁴,
nadahanifahharahapo@gmail.com⁵, rahmihildayanti96@gmail.com⁶

Abstract. This research was written and packaged to provide information related to mass communication. This article links mass communication to political policy. Mass communication can be used as a medium to monitor policies made by the government. Basically, Indonesia is a democratic country and the people's prosperity will be prioritized. Therefore, to follow up on unfair policies carried out by the government, a forum is needed to be able to correct this. This article will discuss how mass communication can fulfill the function of monitoring political policies. Political policies will also be described in this article, accompanied by an examination of policies that are not appropriate by society. The mass communication model will determine the direction of how this mass communication will run. Mass communication will definitely have the effect of building public awareness and correction towards the government.

Keywords: Information, Communication, Political Policy.

Abstrak. Penelitian ini ditulis dan dikemas guna untuk memberikan informasi terkait komunikasi massa. Tulisan ini mengaitkan komunikasi massa terhadap kebijakan politik. Komunikasi massa dapat dijadikan media untuk mengawasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pada dasarnya Indonesia adalah negara demokrasi dan rakyat adalah yang akan dikedepankan kemakmurannya. Maka dari itu untuk menindaklanjuti ketidak-adilan kebijakan yang diperbuat oleh pemerintah dibutuhkan suatu wadah agar bisa mengkoreksi hal tersebut. Tulisan ini akan membahas bagaimana komunikasi massa dapat menempati fungsi untuk mengawasi kebijakan politik. Kebijakan politik akan diuraikan juga dalam tulisan ini disertai dengan menelaah suatu kebijakan yang tidak sesuai oleh masyarakat. Model komunikasi massa akan menentukan arah bagaimana jalannya komunikasi massa ini. Komunikasi massa pasti akan memberikan efek untuk membangun kejelian serta koreksi masyarakat terhadap pemerintah.

Kata Kunci: Informasi, Komunikasi, Kebijakan Politik.

PENDAHULUAN

Komunikasi massa adalah proses komunikasi melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Media massa mencakup berbagai saluran seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan internet. Komunikasi Massa memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi, hiburan, dan mempengaruhi opini publik.

Sebagai sarana penyampain pesan, media massa memiliki tugas penting dalam keberlangsungan realita politik. Salah satu perannya ialah meringkai sebuah pesan, dimana seorang wartawan mendapat jatah yang lebih dalam peran pemberitaan. Berbagai media menghadirkan beberapa berita yang mempunyai kesamaan dalam topik yang diangkat. Perbedaan dalam penyampaian berita itu menarik untuk diteliti,Dimana lewat media massa

kebijakan-kebijakan politik menjadi transparan. selain itu kejadian-kejadian dirana politik juga disebar luaskan melalui media massa diperuntukan ke khalayak agar khalayak mengetahui apa saja yang telah terjadi dirana politik negaranya sendiri.

Kebijakan politik pemerintahan mencontohkan bahwasannya suatu negara ditata oleh lembaga yang menanggulangi kemerdekaan warga negaranya dan melindungi warga negara dari hal-hal yang semena-mena. Untuk mencegah penumpukan kekuasaan di kemudian hari yang mengarah pada tindakan sewenang-wenang, maka perlu dilakukan pemisahan kekuasaan ataupun pengawasan terhadap setiap kinerja yang dilakukan oleh orang-orang pemerintahan lwat kebijakan politik ini.

16

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian atau riset pada Pustaka. Pemanfaatan sumber-sumber yang ada di perpustakaan untuk mendapatkan data untuk penelitiannya. Jadi penelitian ini membatasi kegiatannya hanya dengan materi-materi yang ada dibarisan buku perpustakaan saja tanpa memerlukan penelitian secara langsung dilapangan. Di tulisan ini penulis akan mengembangkan beberapa teori dan masukan yang diperoleh dari perpustakaan, lalu membandingkannya dengan kejadian di lapangan dengan mengangkat pada informasi-informasi di media, kemudian menganalisis topik yang diteliti, kemudian dijadikan sebuah tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Fungsi Komunikasi Massa

Harus dipahami bahwa sedikitnya informasi yang diterima oleh individu serta melekat pada ingatannya adalah tidak lain diperoleh dari media massa. Sejalan dengan hal itu, kita harus memahami pengertian komunikasi massa yang mendalam dari definisi seorang Joseph A. Devito yang menyatakan bahwa komunikasi massa adalah komunikasi yang dimediasi oleh pemrograman audio/visual. Dengan hal senada dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan komunikasi massa yakni proses penyampaian pesan yang ditujukan kepada khalayak berjumlah besar. Tak dilupakan bahwa proses penyampaian pesan komunikasi massa berbicara juga mengenai transmisi pesan dengan media massa cetak serta elektronik.

Menurut M.O Palapah mengartikan komunikasi massa sebagai pernyataan manusia yang ditujukan kepada massa. Adapun bentuk komunikasi massa berisi public relation, jurnalistik, propaganda, agitasi, dan komunikasi internasional. Secara spesifik dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa memiliki peran menyampaikan suatu informasi kepada khalayak umum

dengan menggunakan media massa. Maka media massa yang menjadi ciri khusus komunikasi ini sebab dengan adanya media massa komunikator dengan komunikan tidak harus selalu memiliki kedekatan tempat atau daerah yang sama pula. Komunikasi massa ditujukan secara luas dan terbuka kepada khalayak sehingga serentak dan dengan cepat dapat diterima oleh masyarakat.

Komunikasi massa memiliki fungsi yang baik bagi kehidupan masyarakat. Peranan komunikasi massa ditafsirkan oleh beberapa ahli sebagai bentuk pengawasan, penafsiran, keterkaitan, dan penyebaran nilai serta hiburan. Effendy menuturkan fungsi komunikasi massa sebagai bahan informasi, pendidikan dan memengaruhi. Secara umum dalam tulisan ini akan menelaah fungsi dari komunikasi massa diantaranya:

1. Fungsi informasi. Jelas sekali bahwa komunikasi adalah cara manusia untuk menyampaikan informasi dan ini adalah fungsi utama dalam komunikasi. Peran media massa juga ditampilkan untuk penyebaran suatu informasi tersebut,
2. Fungsi persuasi. Fungsi ini dimana komunikasi massa sangat unggul dalam mempengaruhi publik agar melakukan sesuatu dari apa yang diberikan oleh media massa. Seperti diantaranya dengan bentuk memperkuat sikap, kepercayaan, dan menawarkan suatu nilai tertentu.
3. Fungsi pengawasan. Hal ini berkaitan dengan kontrol masyarakat terhadap suatu aktivitas tertentu. Pengawasan yang dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk kontrol sosial, peringatan, serta ajakan atau mempengaruhi sesuatu. Salah satu contohnya adalah pemberitahuan tentang kasus mafia oleh peradilan sebagai bentuk kontrol sosial dalam media massa.
4. Fungsi korelasi. Korelasi berarti untuk menghubungkan masyarakat kepada berbagai elemen. Maksudnya adalah komunikasi media massa menjembatani masyarakat dengan pemerintah apabila ada kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat bahkan bila sampai merugikan.
5. Fungsi untuk mendorong adanya kohesi sosial. Komunikasi media massa berperan untuk mendorong masyarakat dalam bersatu. Seperti contoh media massa memberitahu bahwa sebagai warga negara Indonesia dalam berbagai bentuk perbedaan tetapi dituntut untuk rukun. Maka dari sini komunikasi massa membentuk kesatuan bagi masyarakat.
6. Fungsi perlawanan kekuasaan dan kekuatan represif. Komunikasi massa dengan bantuan media massa berperan dalam melawan dan merobohkan kekuasaan. Dapat diambil contoh pada masa Orde Baru yang tumbang rezim ini dibawah kepemimpinan Soeharto yang pastinya dikarenakan ada campur tangan media massa.

Media massa memberitakan serta menginvestigasi yang dimana media massa tidak hanya mengikuti apa yang dikatakan pejabat pemerintah melainkan mendobrak kasus ketidak-adilan yang dilakukan oleh pemerintah.

Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pemerintah

Pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dilakukan oleh Lembaga-lembaga yang berwenang di masyarakat dan pemerintah sebagai contoh pengawasan dalam kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh Ombudsmen yang merupakan pengendali penyelenggara pelayanan public yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ombudsman ada berdasarkan pemeriksaan komunitas yang selanjutnya dilakukan oleh ombudsmen atas dasar pengaduan Masyarakat.

Masyarakat punya bagian untuk mengontrol, karena penyelenggaraan negara didasari dengan adanya amanat dari Masyarakat lewat pemilu. ombudsmen melakukan pengawasan untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai yang diinginkan rakyat oleh para pejabat public. Sebelum dibentuknya ombudsmen pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan public hanya dilakukan melalui badan-badan yang diberi tahu, jadi Masyarakat merasa tidak dapat perlindungan yang memadai dalam melakukan pengawasan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga nasional yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bebas dan tidak adanya kewenangan lain. Kegiatan pengawasan bukan tujuan dari kegiatan pemerintah, tetapi alat untuk jaminan tersampainya tujuan pelaksanaan tindakan atau kegiatan tersebut. Dalam hukum ketatanegaraan dan pemerintahan, berarti meyakinkan bahwa segala kegiatan lembaga negara dan otoritas negara (badan dan pejabat tata usaha negara) dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kebijakan Politik

Kebijakan politik ialah sebuah putusan yang ada untuk mengatur serta melaksanakan tiap bentuk serta pembagian kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahannya. Kebijakan politik dibuat serta dilaksanakan oleh pemerintah yang berwenang. Kebijakan politik ada dan dipergunakan untuk melihat perilaku dari semua orang yang bekerja dalam bidang politik dan pemerintahan.

Selain itu yang menjadi ruang lingkup adanya kebijakan politik ini adalah adanya partisipasi Masyarakat, karena kebijakan-kebijakan politik dibuat atas dasar aduan ataupun keluhan Masyarakat terhadap pemerintah. Adanya kerangka kerja juga merupakan factor ataupun ruang lingkup kebijakan politik Dimana dalam hal pengambilan Keputusan.

Fungsi Kebijakan Politik dan Kebijakan Politik Yang Tidak Diterima Masyarakat

Terbentuknya suatu kebijakan politik ialah untuk melahirkan keteraturan yang ada disuatu wilayah kekuasaan ataupun keteraturan dalam melaksanakan suatu sistem yang bersifat publik. Dengan dibuatnya kebijakan maka secara personal masyarakat lebih punya batasan dan aturan dalam proses pelaksanaannya.

Kebijakan publik dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah yang diamanahkan sebagai acuan untuk melakukan berbagai kegiatan maupun tindakan atau hal yang lain dimana masih ada sangkutpautnya dengan publik atau warga negara. Dalam penyusunan kebijakan publik harus terdapat pihak yang berwenang. Kebijakan publik dapat dijalankan dan disahkan seperti undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah maupun daerah, dan juga peraturan-peraturan maka sifatnya menjadi wajib dan harus diaati. Kejadian yang bersangkutan dengan kebijakan politik selalu menghubungkan masyarakat melalui pemberitaan di media massa.

Pada masa demokrasi terpimpin banyak sekali kebijakan-kebijakan politik yang ditentang Masyarakat, karena dianggap merugikan rakyat dan menentang UUD yang ada, sebagai contoh pengangkatan presiden dengan jabatan seumur hidup, hal ini bertentangan dengan pemilihan presiden setiap pemilu sesuai amanat UUD 1945. Dimana tertera jelas dalam UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama lima tahun, dan setelahnya dapat dipilih lagi dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya, masa jabatan presiden dan wakil presiden yang diperbolehkan paling lama hanya dua periode atau selama 10 tahun.

Model Komunikasi Massa Dalam Urusan Mengawasi Kebijakan Politik

Model komunikasi massa ialah sebuah proses yang Dimana orang ataupun kelompok Menyusun sebuah pesan untuk disampaikan ke khalayak, model komunikasi massa ini juga memiliki andil dalam mengawasi kebijakan politik yang mengaitkan Masyarakat kepada politik melalui media massa, diantaranya seleksi berita yang dilakukan atas dasar kepentingan politik, selanjutnya framing Dimana termasuk cara berita dihadirkan ke khalayak untuk Menyusun persepsi Masyarakat, dan yang terakhir gatekeeping, media massa menjadi gerbang keluar masuknya berita, mana berita yang sekiranya dianggap relevan dan penting untuk disampaikan kepada Masyarakat luas.

Efek Komunikasi Massa Terhadap Khalayak Umum

Komunikasi massa memiliki peran dalam penyampaian opini khalayak Masyarakat. Seperti halnya yang telah terjadi, bahwa media merupakan sarana yang ampuh untuk memunculkan opini dan mempengaruhi perilaku dan tingkah laku seseorang. Tetapi dampaknya tidak mudah terlihat, kita tidak tau dampaknya dikemudian hari tetapi bisa tmapak apabila sudah terjadi.

Dalam mempengaruhi Masyarakat, media massa bisa memiliki pengaruh baik secara positif maupun negatif dalam segala bidang terutama politik. Banyak berita-berita mengenai politik

yang disebar luaskan melalui media massa. Dimana semua orang bebas berkomentar dan bebas beropini. Lewat opini yang disampaikan oleh satu orang bisa berefek ke semua orang dan bisa menjadi pengaruh bagi orang-orang yang membacanya. Tetapi selain dampak negatifnya, media massa dapat mengajak para penerus bangsa untuk dapat lebih menyuarakan pendapat serta pandangannya terutama untuk kepentingan negara dimasa yang akan datang.

KESIMPULAN

Komunikasi massa memiliki fungsi yang baik bagi kehidupan masyarakat. Peranan komunikasi massa ditafsirkan oleh beberapa ahli sebagai bentuk pengawasan, penafsiran, keterkaitan, dan penyebaran nilai serta hiburan. Pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dilakukan oleh Lembaga-lembaga yang berwenang di masyarakat dan pemerintah.

Kebijakan politik ialah sebuah putusan yang ada untuk mengatur serta melaksanakan tiap bentuk serta pembagian kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahannya. Kebijakan politik dibuat serta dilaksanakan oleh pemerintah yang berwenang. Kebijakan politik ada dan dipergunakan untuk melihat perilaku dari semua orang yang bekerja dalam bidang politik dan pemerintahan.

Terbentuknya suatu kebijakan politik ialah untuk melahirkan keteraturan yang ada ¹ disuatu wilayah kekuasaan ataupun keteraturan dalam melaksanakan suatu sistem yang bersifat publik. Dengan dibuatnya kebijakan maka secara personal masyarakat lebih punya batasan dan aturan dalam proses pelaksanaannya.

Dalam media massa masyarakat dapat melihat setiap perkembangan dipemerintahan lewat pemberitaan-pemberitaan yang ada di media massa, terutama mengenai kebijakan-kebijakan politik pemerintahan yang Dimana untuk kepentingan Masyarakat sendiri. Media massa dapat menjembatani dalam pengawasan Masyarakat terhadap kebijakan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- ¹² Cholidin Nasir (2017) *Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah melalui mekanisme Citizen Lawuit*
- ⁶ Edi Suharto; *Analisis kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah Sosial dan Kebijakan Sosial*, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005
- ⁵ Faried Ali, Syamsu Alam (2012), *Studi Kebijakan Pemerintah*, Indonesia: Refika Aditama
- ³ Hamad, I. (2004). *Konstruksi realitas politik dalam media massa: sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik*. Indonesia: Granit.

7
Herdiansyah Amanu, Letikarmila (2021), *Peran Media Massa Dalam Komunikasi Politik Di Indonesia*, Jurnal Balayudha, Vol 1

Indra wati, (2021) *pengaruh komunikasi massa terhadap khalayak jurnal prosiding*, Vol 1

9
Musfialdy (2015), *Peran Media Massa Saat Pemilihan Umum Mengawasi Atau Diawasi*, Jurnal Risalah, Vol 26

10
omunikasi Politik, *Media Massa dan Opini Publik*. (2022). (n.p.): PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers.

Komunikasi Massa Sebagai Bentuk Pengawasan Terhadap Kebijakan Politik

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.umpo.ac.id Internet Source	4%
2	journal.widyakarya.ac.id Internet Source	4%
3	bem.fmipa.um.ac.id Internet Source	1%
4	fisip.umsu.ac.id Internet Source	1%
5	ijsrcseit.com Internet Source	1%
6	ejournal.unpatti.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Bangka Belitung Student Paper	1%
8	al-afkar.com Internet Source	1%
9	journal.unnes.ac.id Internet Source	1%

10 Lisa Lisa, Rafles Abdi Kusuma. "FRAMING
PEMBERITAAN JOKOWI 3 PERIODE DALAM
MENGKONTRUKSI REALITAS DI MEDIA
ONLINE", JURNAL DIALOKA: Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi Islam,
2023
Publication

<1 %

11 jurnalilmukomunikasi.uho.ac.id
Internet Source

<1 %

12 jurnalkonstitusi.mkri.id
Internet Source

<1 %

13 ayulli58-busineesplan.blogspot.com
Internet Source

<1 %

14 eprints.iain-surakarta.ac.id
Internet Source

<1 %

15 issuu.com
Internet Source

<1 %

16 ocs.unud.ac.id
Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Komunikasi Massa Sebagai Bentuk Pengawasan Terhadap Kebijakan Politik

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7
